

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu system yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992.

Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi yang baik untuk mengelola data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu keputusan. Pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan koperasi adalah bank, kreditur kantor pajak, calon anggota dan anggota serta

pihak lainnya mengharapkan agar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai salah satu jenis koperasi menerapkan Standar Akuntansi Koperasi.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SUHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang memiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penunjang laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi perkoperasian, sebagai suatu penyelenggaraan koperasi diindonesia, utamanya dalam hal prinsip-prinsip akuntansi yang perlu diterapkan dalam penyajian laporan keuangan koperasi sebagai suatu standar yang telah ditetapkan, maka sudah selayaknya PSAK diterapkan oleh koperasi-koperasi di Indonesia

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh himmah (UMS 2009) yaitu tentang analisis penerapan standar akuntansi keuangan koperasi pada koperasi pegawai republik Indonesia (survaei di Klaten). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa koperasi-koperasi di klaten kurang memadai dan hanya mencapai rata-rata dalam penerapan PSAK 27.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian mengaplikasikan pada obyek penelitian yang lain. Penelitian terdahulu dilakukan di KPRI yang ada di Klaten, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPRI Sragen.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KPRI) DI KABUPATEN SRAGEN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu apakah Standar Akuntansi Keuangan PPSAK 8 telah diterapkan secara memadai oleh KPRI di Sragen?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya mengenai analisis laporan keuangan berdasar penerapan standar akuntansi keuangan koperasi

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dihadapi :

1. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap berkenaan dengan penerapan PPSAK 8 pada KPRI di Sragen.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi perkoperasian dalam penyusunan laporan keuangan pada KPRI di Sragen telah diterapkan sesuai dengan PPSAK 8

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sejauh mana KPRI mentaati akuntansi yang berlaku

2. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah PPSAK 8 tentang akuntansi perkoperasian telah diterapkan di KPRI Sragen

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan tambahan referensi tentang sejauh mana suatu standar akuntansi telah disosialisasikan dan diterapkan, khususnya pada PPSAK 8 tentang akuntansi perkoperasian.